

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Sistem Dan Prosedur	4
2.2 Unsur-Unsur Dalam Sistem.....	5
2.3 Sistem Pengendalian Intern	7
2.4 Penagihan Pajak	10
2.5 Dasar Penagihan Pajak	11
2.6 Tahap-Tahap Penagihan Pajak	11
2.7 Efektivitas.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	14
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	14
3.3 Sumber Data	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data	15
3.5 Teknik Analisis Data	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	18
1. Sejarah Umum KPP Pratama Manado	18
2. Tugas Dan Fungsi	20
3. Visi dan Misi	21
4. Uraian Tugas	22
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	29
4.3 Analisis hasil penelitian.....	37
1. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat paksa	37
2. Analisis Sistem Penagihan Pajak	41
3. Sistem Pengendalian Intern	41

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Rekomendasi	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan yang terbesar bagi Negara yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran dalam APBN. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri.

Pajak yang dulunya melekat dengan sebutan iuran namun sekarang lebih dikenal dengan kontribusi. Sistem pajak kita adalah *self assessment*, dimana WP diberikan kepercayaan penuh, untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri SPT. Apa yang disampaikan oleh wajib pajak dalam perspektif *self assessment* itu akan dianggap benar selama otoritas pajak (kantor pajak) tidak menyatakan bahwa itu tidak benar, untuk menyatakan tidak benar maka kantor pajak akan melakukan serangkaian tindakan *law enforcement*, dilakukan melalui pemeriksaan atau upaya lainnya, upaya tersebut menghasilkan *product (exposure)* namanya ketetapan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat Wajib Pajak. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan penagihan pajak adalah salah satu fungsi penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu kebijakan di bidang pajak adalah dilaksanakannya penagihan pajak untuk wajib pajak yang tidak membayar utang

pajak. Untuk melaksanakan penagihan pajak, juru sita pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak perlu melaksanakan serangkaian tindakan penagihan yang dimulai dengan STP yang dikeluarkan oleh bagian AR (*Account Representatif*) dan SKP dari bagian pemeriksaan selanjutnya dikeluarkan surat teguran, bila tidak diindahkan maka dikeluarkan surat paksa dan jika belum juga ditindak lanjuti akan dilakukan penyitaan barang dan tindakan akhir dari sistem penagihan pajak adalah pelelangan.

Untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak sangatlah dibutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif baik dalam bentuk penulisan alamat yang jelas, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, penegasan dari jurusita pajak atau dengan menambah jumlah jurusita pajak, karena kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih sangat kurang dan wajib pajak sering tidak memenuhi kewajiban membayar pajak pada waktu yang sudah ditetapkan, sehingga diperlukan adanya sistem pelaksanaan penagihan pajak. Tingginya tunggakan pajak yang ada membuat kantor pajak mengeluarkan surat paksa sebagai tindak lanjut untuk proses penagihan pajak terhutang. Sehingga, pencairan tunggakan pajak meningkat. Hal ini terbukti dengan banyaknya surat paksa yang diterbitkan pada bulan desember tahun 2015 yang nominalnya mencapai Rp.86.212.886.849 dengan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 961 lembar dan realisasinya hanya sebesar Rp.8.857.146.302 hal ini jauh lebih besar dari nominal yang di capai bulan agustus tahun 2015 yaitu sebesar Rp.84.238.815.612 dengan 801 surat paksa dengan realisasinya mencapai Rp.4.221.426.355

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menarik judul mengenai “ANALISIS SISTEM PENAGIHAN PAJAK UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme sistem penagihan pajak pada KPP Pratama Manado?

2. Seberapa efektif penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado, berdasarkan sistem penagihan pajak yang dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem penagihan pajak pada KPP Pratama Manado
2. Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Instansi, Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada para fiskus khususnya dibagian penagihan pajak KPP Pratama Manado dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak
2. Bagi Institusi, Menambah literatur di Politeknik Negeri Manado terlebih khusus Jurusan akuntansi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
3. Bagi Mahasiswa, Dapat menambah wawasan dan memberikan informasi tentang sistem penagihan pajak dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sains terapan